BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar yaitu mencakup kurang lebih 2/3 dari penerimaan Negara. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan karena mempunyai umur yang relative terbatas . Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas (Widayati dan Nurlis : 2010)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Negara termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (Ida Zuraida : 2011) . Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* yang merupakan merupakan fungsi utama pajak dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara dan fungsi *regulerend* yang merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Siti Kurnia Rahayu : 2010)

Maka, pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan penerimaan Negara. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara (Siti Kurnia Rahayu : 2010)

Penerimaan dari sektor pajak pusat terdiri dari beberapa jenis yaitu melalui :

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai dan Pajak Daerah Lainnya

Pajak Penghasilan, salah satu pajak yang ada di Indonesia merupakan salah penyumbang terbesar bagi Negara. Pajak Penghasilan memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian, dikarenakan semua rakyat Indonesia atau semua orang yang memperoleh penghasilan di Indonesia merupakan subjek dari pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak (Early Suandi : 2002)

Salah satu pajak penghasilan adalah pajak penghasilan 25. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 Undang-Undang 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban pajak dalam membayar pajak terutang (Siti Resmi : 2003).

Cara menghitung PPh pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak lalu dibagi 12 (belas bulan) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak (Patric : 2013).

Dasar perhitungan PPh 25 tercantum di dalam UU Nomor 7 tahun 1983 yang diubah terakhir dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh 25 adalah menyetor serta melaporkan sendiri pajak terutang, dimana wajib pajak diwajibkan menyetor dan melaporkan sendiri pajak tersebut setiap bulan. Hal ini diatur dalam peraturan PER-22/PJ/2008 tentang tata cara pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25.

Pajak penghasilan PPh 25 termasuk dalam sistem pemungutan pajak secara *self assessment system*. *Self Assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Wirawan : 2003)

Akan tetapi dalam pelaksanaan *self assessment system* ini terdapat beberapa kendala. Menurut Kepala Pelayanan KPP Pratama Bandung Karees, fenomena yang banyak terjadi adalah masih banyak wajib pajak yang salah dalam

menghitung serta terlambat menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan 25 mereka (Yunan : 2013)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan kerja praktek yang berjudul **"Tinjauan atas Perhitungan Penyetoran, Pelaporan PPh pasal 25 di KPP Pratama Bandung Karees**"

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 25 di KPP Pratama Bandung Karees.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dilaksankannya kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara perhitungan PPH 25 di KPP Pratama Bandung Karees
2. Untuk mengetahui cara penyetoran dan pelaporan PPh 25 di KPP Pratama Bandung Karees

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Hasil penelitian ini berupa sekumpulan informasi yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak berkepentingan terhadap yang penulis teliti antara lain bagi :

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat memberi masukan mengenai tinjauan atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan di KPP Pratama Bandung Karees

2. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam hal perpajakan mengenai tinjauan atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan di KPP Pratama Bandung Karees

3. Bagi Akademika

Dapat menjadi bahan refrensi untuk menambah pengetahuan perpajakan mengenai cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 di KPP Pratama Bandung Karees

1.4 Metode Kerja Praktek dan Teknik Pengumpulan Data

1.4.1 Metode Kerja Praktek

Metode Kerja Praktek yang digunakan penulis dalam penulisan laporan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah *Block Release* yaitu metode pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek dalam satu periode tertentu (30 hari kerja).

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

   Observasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis dengan melakukan pengamatan langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees.

b. *Interview* (Wawancara)

   Interview merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap bagian bagian tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan materi penyusunan Lapaoran Kerja Praktek ini.

2. Studi Pustaka

   Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data secara teoritis dengan mempelajari buku-buku, buku panduan kerja praktek, catatan kuliah, dan buku referensi yang lain yang berkaitan erat dengan pembahasan kerja praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek di seksi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, Jalan Ibrahim Adjie no 372 Kiaracondong no 26 Bandung.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan 6 September 2013 dengan jam kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 08.00 sampai 16.00 WIB.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

NO	HARI	WAKTU	KET
1	Senin - Jumat	08.00	Masuk Kerja
2	Senin - Jumat	08.00 - 16.00	Jam Kerja
3	Senin - Jumat	12.00 - 13.00	Istirahat Kerja
4	Senin - Jumat	16.00	Pulang Kerja
5	Sabtu dan Minggu	-	Libur

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	Juli 2013				Agustus 2013				September 2013				Oktober 2013				November 2013				Desember 2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Pendahuluan																								
	1. Pengajuan Kerja Praktek ke perusahaan																								
	2. Persetujuan Kerja Praktek																								
II	Pelaksanaan Kerja Praktek																								
	1. Kerja Praktek																								
III	Pelaporan Kerja Praktek																								
	1. Penulisan Kerja Praktek																								
	2. Bimbingan Kerja Praktek																								
	3. Revisi Kerja Praktek																								
	4. Pengumpulan Data																								
	5. Pengolahan Data																								